

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari uraian analisis pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis rangkumkan adalah sistem pengendalian intern pada proses penyaluran dana BLSM sudah dilaksanakan cukup baik, akan tetapi masih ada sebagian unsur sistem pengendalian intern yang belum di laksanakan sesuai dengan unsur sistem pengendalian intern yang baik, rinciannya sebagai berikut :

1. Penerapan sistem pengendalian intern di lihat dari unsur struktur organisasi yang memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara tegas, maka tampak dalam proses penyaluran dana BLSM sudah terdapat pemisahan fungsi yang jelas. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya perangkapan fungsi dalam proses penyaluran dana BLSM. Dengan demikian di lihat dari unsur sistem pengendalian intern struktur organisasi telah di laksanakan dengan baik.
2. Penerapan sistem pengendalian intern di lihat dari unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, maka tampak jelas bahwa dalam proses penyaluran dana BLSM sudah di laksanakan berdasarkan otorisasi dari atasan yang terlihat pada penetapan jadwal pembagian dana BLSM, serta pelimpahan wewenang yang jelas terlihat pada tidak adanya perangkapan tugas dalam prosedur penyaluran dana BLSM, hal

tersebut berarti masing-masing fungsi telah tahu apa yang menjadi tugasnya dan telah melaksanakan fungsinya dengan baik.

3. Penerapan sistem pengendalian intern di lihat dari unsur praktek yang sehat, maka tampak dalam proses penyaluran dana BLSM telah terdapat bukti penerimaan atas dana BLSM yang telah di bagikan kepada masyarakat, juga adanya laporan pertanggung jawaban yang dibuat untuk pertanggung jawaban intern dalam PT. Pos. Perputaran jabatan telah secara rutin di lakukan. Dengan demikian di lihat dari unsur sistem pengendalian intern praktek yang sehat telah di laksanakan secara baik.
4. Penerapan sistem pengendalian intern di lihat dari unsur karyawan yang kompeten, maka tampak bahwa dalam proses penyaluran dana BLSM latar belakang pendidikan tidak begitu diperhatikan, seleksi calon karyawan telah di lakukan, tetapi belum adanya pelatihan/kursus bagi karyawan. Dengan demikian di lihat dari unsur sistem pengendalian intern karyawan yang kompeten belum dilaksanakan secara maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penentuan Rumah Tangga Sasaran penerima BLSM harusnya menggunakan data yang paling baru, karena penggunaan data lama bias saja menyebabkan penyimpangan.

2. Perlu diadakannya pelatihan/kursus bagi karyawan, dengan dilakukannya pelatihan/kursus akan memaksimalkan kemampuan karyawan dalam menjalankan tugasnya.
3. Perlu diadakan verifikasi data sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu 6 bulan sekali, agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran.
4. Dalam menetapkan jadwal pembagian dana BLSM kantor Pos harusnya melibatkan Dinas Sosial yang berperan sebagai pengawas dana tersebut.
5. Dalam melakukan penyaluran dana BLSM sebaiknya dilimpahkan kepada satu organisasi saja, sehingga dalam melakukan kontrol lebih mudah dilaksanakan.
6. Disarankan bagi peneliti yang ingin melanjutkan kaian yang sama, perlu memperhatikan variabel-variabel lain yang belum diikutsertakan dalam penelitian ini, agar hasil yang dicapai lebih mendekati fakta di lapangan, agar pihak instansi dapat menggunakannya sebagai salah satu referensi dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan 1991. *Auditing Kontemporer*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jeni Kristiana Oki. 2008. *Skripsi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas RSUD Prof. Dr. W.Z. Johanes Kupang*. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Jusup, Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Kemensos. 2013. *Solusi Masalah Kepesertaan & Pemukhtahiran Data Penerima Kartu Perlindungan Sosial*. BPS, Jakarta
- Kemensos. 2013. *Panduan TKSK-Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial(P4S) dan Bantuan Langaung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013*. TNP2K, Jakarta
- Munawir, S. 1984. *Auditing - Pokok-pokok Pemeriksaan Akuntan*. Liberty, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012 tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*.
- Romney, Marshal B dan Paul John Steinbart. 2005. *Accounting Information System*. Edisi 9. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wapres, Sekretariat. 2013. *Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM 2013*. Tim Sosialisasi Penyesuaian BBM, Jakarta
- Suadi, Arief 2001. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit BPFB, Yogyakarta.
- Sugioyono 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sugioyono 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Tuanakota, Theodorus. 1982. *Auditing-Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2009. *Pokok-Pokok Audit Internal*. Harvarindo, Jakarta.

Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi 2. Harvarindo, Jakarta.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang *APBN*.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Widjajanto, Nugroho 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Erlangga, Jakarta